



**MUKOMUKO**

**SENIN, 31 JANUARI 2022**

**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**88% Dibayar 70% Proyek Gedung Wakil Rakyat**

**MUKOMUKO** - Ternyata, pembayaran proyek pembangunan interior ruang rapat paripurna DPRD Mukomuko tidak sesuai dengan klaim pihak rekanan, CV. Bintang Terang. Kontraktor mengajukan pembayaran atas klaim realisasi pekerjaan mencapai 88 persen. Nyatanya, klaim itu ditolak pejabat pembuat komitmen (PPK) atas proyek tersebut.

PPK proyek tersebut, Drs. Yandaryat Priendiana yang saat ini menjabat Penjabat Sekda Mukomuko membenarkan. Ia menyatakan, hanya membayar atas realisasi pekerjaan sebesar 70 persen dari nilai kontrak. Itu menurutnya, sesuai realisasi di lapangan, didasarkan pada harga perkiraan sendiri (HPS) dari PPK.

"Klaimnya 88 persen. Hasil pemeriksaan, kita bayar hanya 70 persen. Pertimbangan karena sisa pekerjaan. Kita hitung pekerjaan yang tersisa berdasarkan HPS dari PPK, tidak berdasarkan penawaran," kata Yandaryat.

Kebijakan itu ditempuhnya, sebagai langkah antisipasi potensi terjadinya lebih bayar. Selain itu, pihaknya memperhitungkan sisa anggaran, agar dapat mencukupi kebutuhan anggaran untuk penyelesaian pekerjaan.

"Karena kalau penawaran itukan, harganya ada yang timpang. Jadi kita, supaya negara jangan rugi. Kalau nanti dilanjutkan, uangnya masih cukup untuk melanjutkan pekerjaan yang tersisa. Jadi itu langkah antisipasi kita," kata Yandaryat.

Ia membantah, selaku PPK tidak memberi peluang ke rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan. Tawaran itu sudah diberikan pihaknya. Hanya saja, rekanan sendiri yang tidak bersedia menandatangani perpanjangan kontrak. "Tidak selesainya pekerjaan, kita menilai waktu itu, mungkin (rekanan) kurang modal. Waktu itu, kita mau kasih perpanjangan, kan ada ketentuannya. Tapi mereka tidak punya itikad, dan tidak menandatangani kontrak perpanjangan," sampainya.

Mengenai diusutnya oleh penyidik Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Mukomuko, Yandaryat mengaku tidak terkejut. Pasalnya, sebelum pihak Polres Mukomuko, sudah juga turun dan diperiksa oleh Polda Bengkulu. "Itukan memang sudah diperiksa dari Polda. Dan kita juga sudah disampaikan, bahwa itu kemudian dikembalikan ke Polres," kata Yandaryat.

Turunnya penyidik dengan membawa ahli melakukan pengecekan fisik pekerjaan, menurutnya hal tersebut biasa. Dan itu sudah menjadi kewenangan Polres, selaku aparat penegak hukum (APH).

"Biarlah prosés hukum tetap berjalan. Polres melakukan tugas mereka sebagai aparat penegak hukum, yang mereka itu menerima laporan. Mereka (turun) melakukan klarifikasi atas itu, makanya mereka melakukan pemeriksaan terhadap kerugian negara," pungkasnya.

Diketahui, proyek itu dilelang sampai lima kali. Pada lelang kelima, baru kemudian proyek ini dapat berujung ke tahap penandatanganan kontrak dan dilaksanakan pekerjaannya. Meskipun akhirnya, proyek yang sudah direncanakan sejak tahun 2016 itu, tidak juga selesai 100 persen.

Awalnya, proyek itu baru muncul pagu anggarannya pada APBD Kabupaten Mukomuko pada tahun anggaran (TA) 2017. Tadinya saat itu, sampai 3 kali. Namun tetap gagal sampai ke tahap penandatanganan kontrak dengan rekanan.

Dari data yang RB peroleh, proyek pembangunan interior ruang rapat paripurna DPRD Mukomuko itu, ditahun 2017, dialokasikan dana sebesar Rp 1,88 miliar lebih. Saat itu, pimpinan OPD Sekretariat DPRD Mukomuko, Syahrizal, SH. Dan yang menjabat Ketua DPRD Mukomuko ditahun ini, Armansyah, ST.

Dilaksanakan tiga kali lelang, ditahun tersebut gagal mendapatkan rekanan yang bertandatangani kontrak. Lalu kembali dialokasikan tahun anggaran 2019, dengan pagu dana berkurang sedikit, menjadi hanya Rp 1,8 miliar. Turun sekitar Rp 80 juta dari anggaran yang dialokasikan di tahun 2017. Saat penganggaran, Ketua DPRD Mukomuko masih dijabat Armansyah, ST. Lalu saat kegiatan selesai tender, Ketua DPRD Mukomuko dijabat Ketua Sementara, M. Ali Saftaini, SE. Dengan pimpinan OPD Sekretariat DPRD, dijabat Drs. H. Bustari M, M.Hum.

Saat lelang pertama ditahun itu, juga batal. Ada 31 peserta, hanya satu peserta yang menyampaikan harga penawaran. Kemudian dilelang kedua, jumlah pesertanya jauh lebih banyak, mencapai 53 peserta. Dan dinyatakan menang dan berkontrak CV. Bintang Terang, dengan harga penawaran Rp 1,6 miliar, dan kemudian harga terkoreksi dan berkontrak Rp 1,58 miliar. (hue)